

BAB IV

KOTA BANYUMAS PASCA PERPINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KE KOTA PURWOKERTO

A. Perekonomian

Perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto menjadi sebuah peristiwa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan perekonomian di Kota Banyumas. Sebagai sebuah pusat pemerintahan kabupaten dan karesidenan, pertumbuhan ekonomi di Kota Banyumas cukup baik. Pemerintah kolonial Belanda selain membangun Kota Banyumas sebagai kota pusat pemerintahan juga berusaha mengembangkan perekonomian di Kota Banyumas. Hal tersebut terlihat dengan dibangunnya pasar Kota Banyumas yang terletak di sebelah selatan jembatan Sungai Serayu.¹ Pasar tersebut menjadi tempat perputaran perekonomian di wilayah Kota Banyumas yang sangat besar artinya bagi masyarakat. Selain membangun pasar, pemerintah kolonial Belanda juga membangun kantor *Algemene Volks Kredit Bank* (AVB). Kantor AVB ini terletak di sisi sebelah utara jalan *bankstraat* yang melintang di sisi selatan alun-alun.

Selain melakukan pembangunan pasar dan kantor *Algemene Volks Bank* (AVB), untuk meningkatkan aktifitas perekonomian di wilayah Kota

¹ Prima Nurahmi M, “Runtuhnya Suatu Kejayaan: Kota Banyumas 1900-1937”, dalam Sri Margana dan M. Nursam (Ed), *Kota-Kota di Jawa, Identitas, Gaya Hidup, dan Permasalahan Sosial*, Yogyakarta:Ombak, 2010, hlm. 22.

Banyumas pemerintah kolonial Belanda juga membangun Hotel Carolina. Selain itu, dibangun pula perusahaan-perusahaan pemerintah seperti perusahaan air/*waterleiding*, serta perusahaan listrik. Demikian pula perusahaan-perusahaan dagang yang menggunakan Sungai Serayu sebagai jalur pengangkutan barang-barang dagangan mereka, para pengusaha tersebut umumnya juga mendirikan gudang maupun kantor mereka di sekitar Kota Banyumas. Keberadaan perusahaan-perusahaan yang menggunakan transportasi Sungai Serayu serta mempunyai gudang maupun kantor dagang di Kota Banyumas memberikan dampak yang positif bagi perekonomian di Kota Banyumas. Aktifitas di pasar Kota Banyumas pun ramai, karena orang-orang yang bertrasnsaksi di pasar bukan hanya orang-orang pribumi, namun banyak pula orang-orang non pribumi.

Perkembangan perekonomian di Kota Banyumas sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Serayu. Sebagai sebuah pusat pemerintahan kabupaten dan karesidenan, Kota Banyumas yang dilewati langsung oleh Sungai Serayu menjadi daya tarik tersendiri bagi pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda membangun jembatan Sungai Serayu permanen pertama pada tahun 1981 di Kota Banyumas. Jembatan ini menghubungkan Kota Banyumas dengan distrik Sokaraja.² Melalui jembatan Sungai Serayu inilah mobilitas masyarakat dari Kota Banyumas yang akan menuju ke Kota Purwokerto maupun sebaliknya menjadi lebih mudah. Di

² *Ibid.*

wilayah lain yang dilewati Sungai Serayu, penyeberangan hanya dilakukan dengan menggunakan bantuan tambang.³ Sehingga aktifitas dan mobilitas masyarakat sangat terbatasi.

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto tahun 1937 menjadi sebuah titik balik bagi perekonomian di Kota Banyumas. Perekonomian di Kota Banyumas seolah menjadi “mati suri” tidak pernah berkembang lagi. Walaupun kemunduran perekonomian di Kota Banyumas sudah mulai dirasakan sejak berkembangnya trasnsportasi darat tepatnya sejak dibangunnya jalur trem dan kereta api yang melewati Kota Purwokerto. Namun demikian, dengan dipindahnya pusat pemerintahan kabupaten, karesidenan serta simbol sakral pemerintahan Kabupaten Banyumas yaitu pendopo Si Panji, semakin mempertegas keterpurukan perekonomian Kota Banyumas. Kota Banyumas seolah berubah menjadi kota yang tidak memiliki arti yang penting lagi bagi pemerintah kolonial. Hal tersebut dikarenakan kantor-kantor perusahaan baik milik pemerintah maupun kantor perusahaan swasta semakin tegas meninggalkan Kota Banyumas dan berpindah ke Purwokerto yang dianggap mempunyai prospek perekonomian lebih baik.

³ M. J. van der Pauwert, “Memori Residen Banyumas, 24 Oktober 1925” *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977, hlm. XCIX.

Dengan semakin sepinya aktifitas pemerintahan, maka hal tersebut mengakibatkan semakin sepinya pula aktifitas ekonomi di Kota Banyumas. Pasar di Kota Banyumas yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pusat perekonomian Kota Banyumas pun semakin sepi. Aktifitas perekonomian yang sebelumnya banyak pula melibatkan orang-orang non pribumi, setelah Banyumas tidak lagi menjadi pusat pemerintahan maka aktifitas perekonomian di pasar lebih banyak melibatkan orang-orang pribumi. Sehingga aktifitas perekonomian di pasar Banyumas pun tidak pernah berkembang pesat seperti halnya yang terjadi di Kota Purwokerto.

B. Pemerintahan

Wilayah Kota Banyumas merupakan wilayah yang telah menjadi pusat pemerintahan cukup lama. Jauh sejak sebelum pemerintah kolonial Belanda datang ke wilayah Banyumas dan menjadikan Kota Banyumas sebagai pusat pemerintahan karesidenan pada tahun 1831. Wilayah Kota Banyumas telah menjadi pusat pemerintahan kabupaten sejak 6 April tahun 1582.⁴ Dengan kondisi demikian masyarakat di Banyumas tidak pernah sama sekali menyangka bahwa pusat pemerintahan di Kota Banyumas yang telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan seperti Majapahit hingga Mataram akan hilang.

⁴ Berdasarkan seminar hari jadi Banyumas yang diselenggarakan pada tanggal 14 November 1989 di Pendapa Si Panji, Purwokerto, ditetapkan bahwa Kadipaten Banyumas berdiri pada hari Jumat, 6 April 1582. Walau masih terjadi pro kontra, khususnya dari beberapa sejarawan Banyumas, akantetapi hingga kini, tanggal 14 November tersebut masih diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Banyumas.

Kota Banyumas tidak lagi menjadi kota yang penting akantetapi berubah menjadi daerah biasa yang tidak pernah berkembang pesat hingga sampai saat ini.

Peristiwa perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto yang terjadi pada tahun 1937 memberikan dampak yang besar terhadap pemerintahan yang ada di Kabupaten Banyumas. Pasca peristiwa perpindahan pusat pemerintahan tersebut pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan sebuah kebijakan tentang wilayah pemerintahan Kabupaten Banyumas. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 1937. Kebijakan tersebut tertuang dalam *staatsblaad* no. 343 tahun 1937 dan menerangkan bahwa wilayah pemerintahan Kabupaten Banyumas terdiri dari: Distrik Banyumas, yang membawahi daerah Banyumas, Sokaraja, Kebasen dan Patikraja, Distrik Sumpiuh, yang membawahi daerah Sumpiuh, Kemranjen, dan Tambak, serta Distrik Purwokerto yang membawahi daerah Purwokerto, Kebumen, Kembaran dan Subang.⁵ Dengan kebijakan yang tertuang dalam *staatsblaad* no. 343 tahun 1937 tersebut maka secara sah Kota Banyumas tidak lagi berstatus sebagai ibu kota kabupaten maupun ibu kota karesidenan. Kota Banyumas hanya berstatus sebagai distrik dan sebagai ibu kota Kecamatan Banyumas. Meskipun secara kantor Karesidenan Banyumas

⁵ H.G.F. van Huls, *Memorie van Overgave Residen van Banjoemas*, microfilm seri 2e reel 6, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

pada tahun 1937 masih berada di Kota Banyumas, akantetapi hal tersebut terjadi hanya karena kantor karesidenan yang ada di Kota Purwokerto belum selesai pemabangunannya. Sehingga Residen Banyumas saat itu H.G.F. van Huls tidak bisa langsung bersama-sama Bupati Banyumas R.A.A Soedjiman Gandasoebrata pada 6 Januari 1937 langsung pindah ke Kota Purwokerto. Residen Banyumas selama pembangunan gedung karesidenan belum selesai masih tetap tinggal di Kota Banyumas.

Pasca perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto, pemerintahan di Kota Banyumas dipimpin oleh seorang camat. Tempat yang digunakan sebagai kantor pemerintahan adalah bekas kompleks pemerintahan kabupaten. Secara fisik tidak terjadi perubahan yang berarti terhadap kompleks kantor pemerintahan. Hanya pendopo Si Panji saja yang telah diganti dengan pendopo duplikat karena pendopo yang asli telah dipindahkan ke Kota Purwokerto.

